



BULETIN

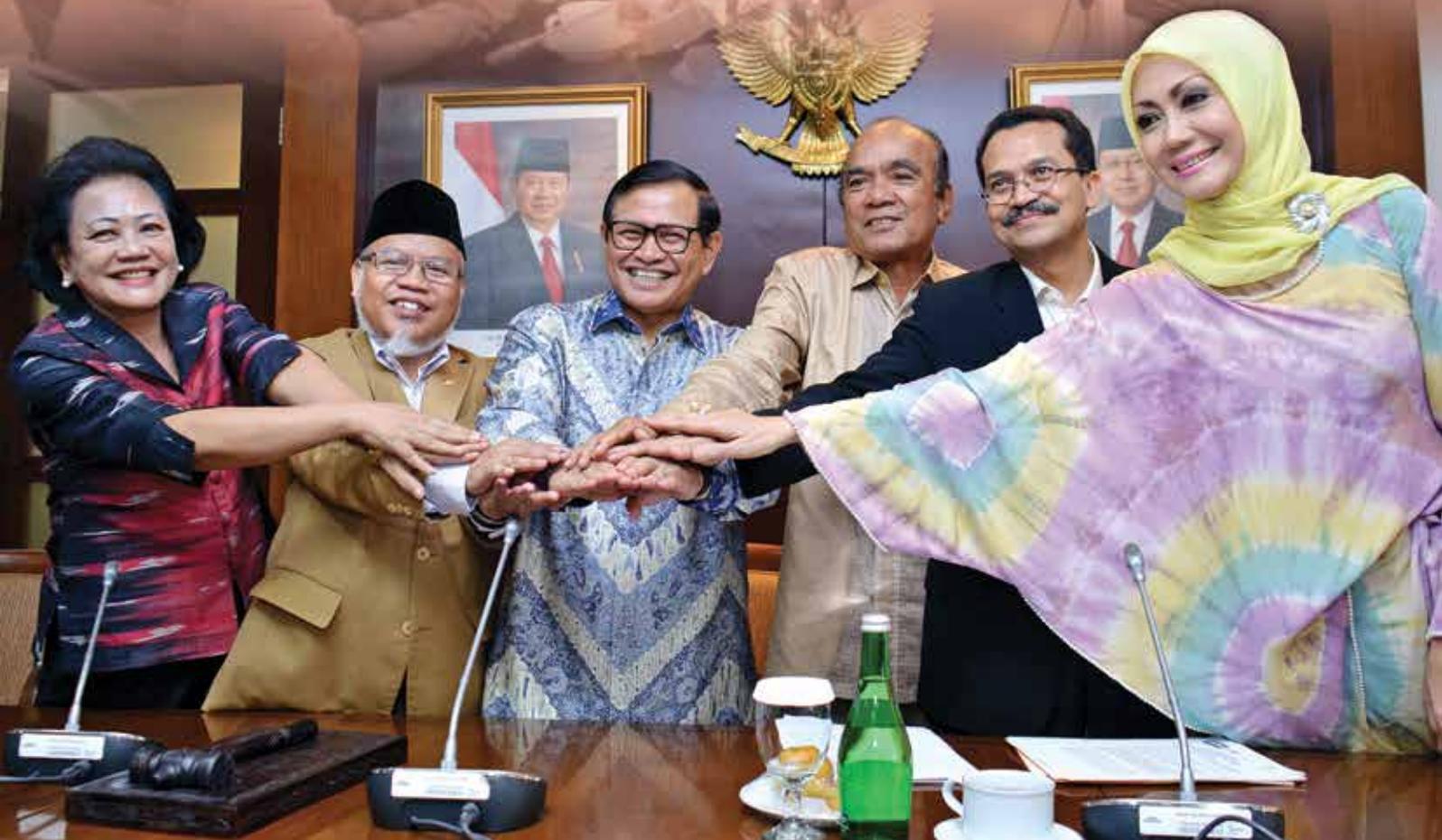
PARLEMENTARIA

NOMOR: 829/VIII/2014

III/AGUSTUS 2014



DPR Gelar Workshop Wujudkan Parlemen Bebas Korupsi



Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA AGUSTUS 2014

Kegiatan DPR pada pertengahan Agustus 2014 ditandai dengan dimulainya kembali Masa Persidangan I 2014 dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Persidangan I 2014 oleh Ketua DPR pada 15 Agustus siang hari. Sebelumnya pada pagi hari yang sama, yaitu 15 Agustus, telah berlangsung Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI dengan acara Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ringkasan kegiatan tersebut.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI 15 Agustus

Sidang bersama DPR dan DPD RI pada 15 Agustus pukul 09.00 wib dipimpin oleh Ketua DPR RI. Dalam pengantarnya, Ketua DPR mengatakan bahwa rangkaian peringatan hari kemerdekaan RI ke-69 harus benar-benar menjadi momentum yang berharga bagi bangsa Indonesia. Beberapa bulan menjelang hari kemerdekaan tahun ini, bangsa Indonesia telah melewati proses demokrasi yang makin matang melalui Pemilu legislatif 9 April dan Pilpres pada bulan Juli 2014. Kedua Pemilu telah berjalan lancar dan aman, menunjukkan kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi, meskipun terdapat catatan dalam penyelenggaraannya. Kedua Pemilu menghasilkan wakil-wakil rakyat sebagai anggota legislatif dan Presiden/Wakil Presiden yang diharapkan benar-benar memenuhi harapan masyarakat, membawa bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Pada kesempatan pidato tersebut, Ketua DPR juga memberikan apresiasi pada pemerintahan Presiden SBY yang mampu menciptakan suasana kondusif, aman dan damai selama berlangsungnya proses kedua Pemilu. Keberhasilan pemerintahan SBY berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir, yang mampu mendukung proses suksesi kepemimpinan yang baik dan wajar.



semangat perjuangan, pengabdian dan pengorbanan yang luar biasa.

Setelah hampir tujuh dekade merdeka, Indonesia diabad ke-21 terus tumbuh menjadi bangsa yang semakin bersatu, semakin damai, semakin makmur dan semakin demokratis. Semua yang kita capai selama ini adalah kulminasi gabungan dari sumbangsih dan kerja keras seluruh generasi, mulai dari era Presiden Soekarno, Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Puteri hingga era sekarang ini yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang



Yudhoyono. Insya Allah ke depan, menurut Presiden kesuksesan ini akan dilanjutkan di era Presiden Indonesia yang ke-7 dan Presiden-presiden berikutnya. Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa kebijakan dasar dan program pemerintahan lima tahun ke depan harus di titik beratkan pada tiga agenda utama, yaitu pembangunan demokrasi, penegakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tiga agenda besar ini tidak bisa dipisahkan dan justru saling mendukung. Demokrasi tanpa keadilan adalah sesat, keadilan tanpa kesejahteraan adalah semu dan kesejahteraan tanpa demokrasi adalah timpang. Rakyat Indonesia perlu bersyukur bahwa sejak bergulirnya reformasi, demokrasi Indonesia terus tumbuh semakin kuat melalui empat kali Pemilu secara teratur dan damai, pergantian Pemerintah secara konstitusional dan damai pula.

Selama satu dekade terakhir, kita mencatat beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia. *Pertama*, dapat menjaga stabilitas dan kondisi makro-ekonomi yang relatif baik, walaupun bangsa kita terus diterpa cobaan, apakah itu dalam bentuk bencana alam maupun krisis moneter global utamanya pada tahun 2008. *Kedua*, Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada 2009-2013, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9 persen. Ini jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi AS, Jepang dan Eropa pada kurun waktu yang sama. Kemampuan Indonesia menjaga laju pertumbuhan ekonomi sangat penting mengingat dewasa ini cukup banyak negara-negara *emerging* ekonomi lainnya yang pertumbuhan ekonominya menurun, bahkan cukup tajam. *Ketiga*, hutang negara juga kini telah berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Hutang adalah faktor penting karena berkaitan dengan rasa percaya diri dan harga diri suatu bangsa. Dalam hal rasio hutang terhadap PDB Indonesia, adalah yang terendah di antara negara-negara G-20. Kita telah melunasi hutang kepada IMF dan melakukannya empat tahun lebih awal dari jadwal yang disepakati. Dalam hal hibah, dari dunia internasional hanya berjumlah sekitar 0,7 persen dari seluruh anggaran nasional. Ini menandakan bahwa Indonesia telah mencapai kemandirian ekonomi yang makin signifikan. *Keempat*, Indonesia telah menjadi anggota G-20. Ini menandakan bahwa posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. G-20 di abad ke 21 telah menjadi forum utama untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional.

Presiden juga menyampaikan bahwa dalam dekade emas sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah diapresiasi, khususnya pada pertemuan *World Economic Forum* di Filipina tahun ini. Ini adalah penilaian obyektif dari suatu badan internasional yang independen dan prestisius. Dalam dunia serba labil yang penuh dengan gejolak, Indonesia bersyukur dapat menikmati stabilitas politik, perdamaian, pertumbuhan ekonomi dan kerukunan nasional. Hal ini telah dicatat dan diapresiasi oleh dunia, sehingga meningkatkan modal politik Indonesia dalam percaturan internasional. Alhamdulillah, menurut Presiden bahwa sejak era reformasi,



posisi Indonesia di dunia internasional terus berlangsung dan telah menjadi kekuatan regional, sekaligus pemain global yang disegani. Di abad 21, Indonesia terus membuka dan memperluas ruang gerak diplomasi dengan siapapun sepanjang mendukung kepentingan nasional kita-apa yang dinamakan politik luar negeri ke segala arah (*all direction foreign policy*) dan sejuta kawan tanpa satupun lawan (*a million friends and zero enemy*). Indonesia telah membangun kemitraan strategis dengan seluruh negara-negara besar dan sebagian besar adalah *emerging powers* dunia.

Kita juga terus mengupayakan keseimbangan dinamis-*dynamic equilibrium* sehingga pergeseran geo-politik yang kini sedang terjadi, tidak mengakibatkan ketegangan atau konflik baru. Pada akhir sambutan, Presiden mengatakan bahwa yang paling penting untuk dibangun adalah sistem demokrasi, sistem ekonomi dan sistem politik. Kita juga harus menjaga ke-Indonesiaan kita. Perjuangan di abad ke 21 tidak lagi menjaga kemerdekaan, namun menjaga ke-Indonesiaan. Tidak ada gunanya kita menjadi semakin makmur dan modern, namun kehilangan yang amat fundamental dan terbaik dari bangsa kita, yaitu : Pancasila, ke-Bhinekaan, semangat persatuan, toleransi, kesantunan, pluralisme, dan kemanusiaan. Para pendiri bangsa dulu mempertahankan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan. Bagi generasi kita kini, ke-Indonesia-an lah yang harus kita pertahankan mati-matian.

Setelah 69 tahun merdeka, Indonesia telah tampil menjadi demokrasi yang besar, ekonomi yang kuat dan pemain internasional yang disegani serta masa depan yang menjanjikan. Dunia melihat Indonesia bukan saja sebagai kawan, namun sering pula sebagai rujukan yang positif, terlepas dari segala permasalahan dalam negeri yang masih terus dihadapi. Kita bisa membuktikan pada dunia bahwa di bumi Indonesia, **demokrasi, Islam dan modernitas** dapat tumbuh bersama.

Uraian pidato pembukaan Persidangan ke I Tahun sidang 2014 dan pidato Presiden mengenai RAPBN 2014 akan dimuat dalam buletin berikutnya. ***

DPR Gelar Workshop Wujudkan Parlemen Bebas Korupsi



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat dan Ketua BAKN Sumarjati Arjoso saat Konferensi Pers

Aliansi Internasional anggota Parlemen yang tergabung di dalam *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) akan mengadakan *Board of meeting* dan *SEAPAC Workshop* dengan tema “*Stronger Ethics and Integrity : Path of Parliament to Combat Corruption*” pada tanggal 28-29 Agustus 2014 mendatang.

“Melalui workshop ini kita akan membangun gerakan parlemen untuk *zero corruption*. Pertemuan SEAPAC di Medan memiliki gaung luar biasa di dunia internasional. Bahkan saat memberikan sambutan banyak disitir oleh kalangan penggerak anti korupsi,” ujar Ketua GOPAC sekaligus Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, saat Konferensi Pers, di Gedung Nusantara III, Rabu, (20/8).

Menurutnya, Workshop akan berlangsung selama dua hari dan melibatkan berbagai negara yang tergabung dalam GOPAC serta yang telah meratifikasi UNCAC. “Tema yang diambil yaitu mengenai isu etik dan *integrity*

dimana kita berharap dapat mendorong gerakan anti korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Terkait perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia, jelas Pramono, kita telah melangkah cukup jauh bahkan sudah hampir semua aturan internasional diratifikasi oleh Indonesia. “Kita sudah memiliki UU Tipikor, lembaga KPK, UU *Money Laundry*, dan UU Keuangan negara,” jelasnya.

Dia mengharapkan, Indonesia juga dapat segera membuat UU mengenai *Asset Recovery*. Pasalnya, melalui RUU ini diharapkan siapapun koruptor yang menaruh uangnya di luar negeri dapat ditarik kembali ke Indonesia. “Kita optimis dapat diundangkan, ini juga sudah menjadi harapan dan kita mendorong sejak tahun 2008,” paparnya.

Menyoroti praktek korupsi di Dewan, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, praktis sejak tahun 2013 praktek korupsi semakin berkurang

yang melibatkan oknum anggota Dewan.

“Praktek korupsi biasanya melibatkan Anggota dewan, pengusaha dan pemerintah, sekarang ini sudah semakin berkurang bahkan sejak MK memutuskan Banggar tidak membahas hingga satuan tiga,” ujar Pramono.

Menurutnya, apabila DPR segera meratifikasi mengenai *asset recovery* maka tidak ada lagi yang perlu diratifikasi mengenai pemberantasan korupsi. “Saya sangat menginginkan, DPR segera meratifikasi aturan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) terkait *asset recovery*, jika sudah diratifikasi maka kita telah memiliki semua instrumen dalam memberantas korupsi,” jelasnya.

Dia menambahkan, GOPAC merupakan embrio untuk mengencarkan gerakan anti korupsi di Indonesia. “Kita harus membangun gerakan internal Parlemen salah satunya dengan gerakan anti korupsi,” paparnya.



Contoh Hongkong

Ketua BAKN Sumarjati Arjoso dari Fraksi Gerindra mengatakan, Indonesia seharusnya mencontoh Hongkong yang sudah maju mengenai pemberantasan korupsi.

“Mereka itu mulai dari perencanaan sudah ada pre audit sementara Indonesia itu setelah proyek baru ditemukan penyelewengan,” ujarnya.

Menurutnya, melalui audit sejak

awal (Pre audit) mulai dari perencanaan maka kita dapat mencegah penyelewengan anggaran. “Jadi uang yang digelontorkan tidak dikorup bahkan bisa dicegah sedini mungkin,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengharapkan, workshop dapat memberikan pengayaan bagi para anggota GOPAC dan SEAPAC yang hadir. “Nanti yang akan menjadi pembicara diantaranya Siswono Yudho Husodo, Juru bicara KPK, peserta GOPAC, dan SEAPAC, serta ICW, kita

juga mengharapkan para wartawan dapat meliput acara tersebut,” ujar Pramono.

Workshop yang direncanakan pada tanggal 28-29 Agustus 2014 akan dihadiri oleh anggota SEAPAC dari *National Chapter* negara Malaysia, Filipina dan Timor Leste, Brunei Darussalam, Laos, dan Thailand sebagai *observer*, Anggota GOPAC Indonesia *National Chapter*, serta GOPAC *Secretary*. (si) *foto: odjie/parle/hr.*

Publik Harus Tahu Alasan Pasti Mundurnya Dirut Pertamina

Sebagai pejabat publik atau Direktur Utama BUMN terbesar di Republik ini, Karen perlu menyampaikan secara terbuka alasan sebenarnya pengunduran dirinya. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo di Gedung DPR RI, Senayan Selasa (19/8).

“Sebagai Dirut Pertamina yang sudah bertahun selama enam tahun itu tentunya hal yang luar biasa. Alasan karena tekanan atau karena ingin mengajar di Harvard, perlu secara terbuka publik mengetahuinya. Sebab jika kemudian ada tekanan, ini juga akan bagus diketahui oleh pemerintahan yang baru, karena akan memberikan kontribusi kepada pemerintahan baru untuk melakukan tindakan yang lebih baik agar tidak terjadi tekanan-tekanan di kemudian hari,” papar Pramono.

Ditambahkannya, Karen menjalani tugas sebagai Dirut Pertamina tidak sebentar, dan tentunya ia mengetahui permasalahan dan seluk beluk yang ada di dalam Pertamina. Dan ia baru mengetahui pengunduran diri Dirut Pertamina dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Oleh karenanya ia berharap agar Dahlan juga terbuka akan hal tersebut.

“Sekarang ini era keterbukaan, saya berharap betul pak Dahlan secara gamblang dan terbuka menyampaikan alasan yang sebenarnya. Jangan kemudian ada alasan terkait dengan kebijakan ataupun tekanan dari pihak



Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan

tertentu yang membuat dia harus mengundurkan diri. Sekali lagi publik harus tahu itu,” tegasnya.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi VI Hendrawan Supratikno, banyak pihak mempertanyakan pengunduran diri Galaila Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT. Pertamina. Ia justru bertanya, ada apa dibalik pengunduran dirinya itu,” katanya.

Menurutnya, jabatan yang sangat strategis dan penting seperti Dirut Pertamina sudah disadari betul oleh Karen. Dia pasti akan banyak mengalami tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pertamina.

Hendrawan menyatakan, Komisi VI juga berkepentingan untuk bertanya langsung kepada Karen. “Kalau alasan-

nya mau ngajar di Amerika, emang Karen dosen? Saya yang sudah 28 tahun jadi dosen saja, birahi mengajarnya bisa dikendalikan, kok. Apalagi Karen yang tidak pernah mengajar. Ini mengundang pertanyaan,” imbuh politisi PDI Perjuangan.

Lebih lanjut Hendrawan mengungkapkan, kemungkinan mundurnya Karen lantaran dia marah kepada pemerintah. Usulan kenaikan elpijinya tidak disetujui dan persoalan PLN tak pernah tuntas. “Atau ada faktor lain, karena namanya disebut-sebut dalam kasus di KPK, sehingga dia ingin ke Amerika untuk menenangkan diri,” ungkap Hendrawan.

Tetap Beri Warna

Sementara itu Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan mengharapkan meski Karen Agustiawan mundur dari Dirut PT Pertamina, tetapi tetap ikut memberi warna kebijakan dunia energi khususnya migas di Indonesia ke depan. Pasalnya, selama enam tahun menjabat Dirut Pertamina telah berprestasi membawa perusahaan minyak itu ke jajaran *World Class Company*, masuk dalam jajaran 500 perusahaan terkemuka di dunia. Prestasi yang membanggakan bangsa.

Meski demikian ia menyatakan mundurnya Karen, sedikit *surprise* dan mengagetkan. “Rupanya sesuai *schedule*nya akan mengajar di Universitas Harvard. Kalau nggak diambil,

kesempatan ini akan hilang. Itu adalah hak privasinya dan kita hormati karena akan memberi kesempatan kepada yang lebih muda,” tutur Milton.

Saat ditanya apakah sikap Karen itu karena tekanan, Milton mengatakan kalau dikaitkan dengan kebijakan itu normative sifatnya. Semua Dirut Pertamina punya dilema dalam menentukan posisi, di satu sisi harus bertanggungjawab kepada perusahaan PSO (*Public Service Obligation*) dan disisi lain harus men-

jalankan bisnis korporasi. Dua hal yang harus diseimbangkan, dan ini telah dijalani dengan baik oleh Karen.

“Saya juga bangga karena saya adik kelas di ITB, sama-sama di teknik fisika. Saya juga pernah di Pertamina. Semoga itu menjadi jalan terbaik bagi Karen masuk ke kelas internasional,” kata Milton yang juga politisi Partai Demokrat.

Lebih lanjut Milton mengatakan, ka-

lau alasan pengunduran Karen karena soal kenaikan Elpiji, Milton mengatakan Elpiji ada dua macam, yang subsidi dan non subsidi. Yang 12 dan 50 kg itu korporasi, kenaikan diatur oleh BUMN diatur oleh Menteri. “Nah kalau korporasi ini terus menerus dirugikan dalam konteks harga 12 kg dan 50 kg, berarti tidak ekonomis. Itu kan membuat catatan merah bahwa korporasi karena mengalami kerugian,” jelasnya. (ayu,mh,mp) foto: iwan armanias/parle/hr.

Opini Disclaimer Kemenparekraf Harus Dapat Perhatian



Pimpinan Komisi X DPR saat Raker dengan Kemenparekraf

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2013 mendapat opini *disclaimer*. Opini ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, yang masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Komisi X meminta Kemenparekraf menyikapi hal ini dengan serius.

“Komisi X mendesak DPR untuk melakukan perbaikan agar opini hasil pemeriksaan BPK menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun-tahun mendatang,” jelas Wakil Ketua Komisi

X DPR Utut Adianto saat membacakan hasil rapat, di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Rabu (20/08).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, faktor yang membuat Kemenparekraf mendapat opini *disclaimer* karena masih ada permasalahan administrasi yang belum diselesaikan.

“Bidang pendidikan dan kebudayaan sekarang ditarik ke Kemendikbud, sehingga ada barang milik negara yang administrasinya harus diperbaiki, yang nilainya mencapai Rp 86 miliar, itu sebabnya mendapat *disclaimer*. Saya yakin, persoalan ini masih bisa untuk diperbaiki,” imbuh Utut.

Justru, tambah Utut, yang perlu mendapat perhatian adalah serapan anggaran yang hanya 83%. Sebelumnya, Menparekraf Mari Elka Pangestu memaparkan, realisasi belanja Kemenparekraf RI TA 2013 hanya Rp.1,6 triliun atau 83,81% dari pagu APBN TA 2013 sebesar 1,9 triliun.

“Ini yang ke depan harus diperhatikan dengan serius. Karena itu Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar realisasi belanja tahun 2014 lebih optimal dengan tetap memperhatikan efisiensi, ketetapan sasaran, dan mencapai target yang telah ditetapkan,” tutup Utut. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr.

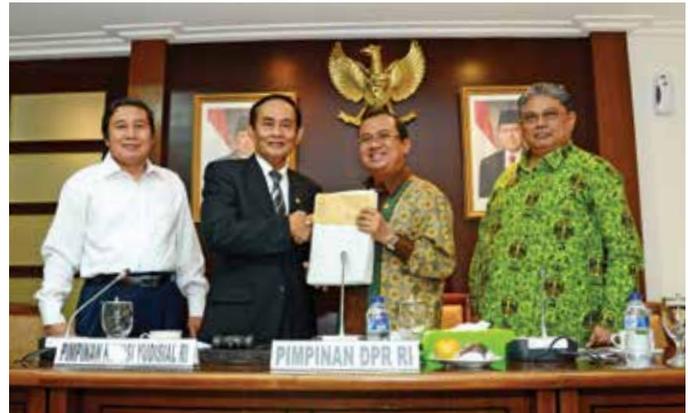
KY Usulkan 5 Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial (KY) secara resmi mengajukan 5 Calon Hakim Agung (CHA) kepada Pimpinan DPR RI. Kelimanya sudah melewati seleksi yang sangat ketat dan layak untuk diusulkan kepada DPR.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dengan Wakil Ketua KY Abbas Said, Rabu (20/8), di Ruang Rapat Pimpinan DPR. Kelima CHA tersebut adalah Amran Suadi (Agama), Purwosusilo (Agama), Sudrajad Dimiyati (Perdata), Muslich Bambang Luqmono (Pidana), dan Is Sudaryono (TUN). Kelimanya, jelas Abbas, telah memenuhi kualitas moral dan intelektual sebagai CHA.

Priyo berharap, Komisi III DPR agar memprioritaskan seleksi CHA ini dan menjalin komunikasi yang sinergis dengan KY. Selanjutnya, diusulkan agar KY bertemu kembali dengan Pimpinan DPR dan KY secara khusus, untuk menjelaskan secara detail rekam jejak dan fakta integritas para CHA. Dengan demikian, Komisi III punya bekal yang cukup untuk memutuskan para CHA tersebut ditolak atau diterima.

Lebih lanjut Abbas menjelaskan, sebetulnya MA membutuhkan 10 CHA untuk mengisi kekosongan di lembaganya. Namun, setelah diseleksi, KY hanya bisa merekomendasikan 5 CHA. Seleksi yang dilakukan KY berawal dari seleksi ad-



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima Pimpinan KY

ministrasi, lalu uji kelayakan berupa uji kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara.

Yang menarik, dari kelima CHA yang diusulkan itu, ada nama Sudrajad Dimiyati. Dia adalah CHA yang dahulu sempat heboh karena kasus toilet di DPR. Pimpinan KY sudah menyatakan kasusnya *clear*. Artinya, Sudrajad tidak terbukti melakukan praktik transaksional dengan salah satu anggota Komisi III di sebuah toilet. KY bertanggung jawab atas pencalonannya dan karenanya ia layak diajukan sebagai CHA," kata Abbas. (mh) foto: andry/parle/hr.

MA Butuh Hakim Berkualitas dan Bermoral

Saat ini Mahkamah Agung (MA) membutuhkan para Hakim Agung yang bermoral dan berkualitas. Kualifikasi bermoral dan berkualitas merupakan kombinasi yang harus dipenuhi para calon hakim agung (CHA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY).

Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan KY dengan Pimpinan DPR, Rabu (20/8). Delegasi KY dipimpin Wakil Ketua KY Abbas Said dan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Ruang Rapat Pimpinan DPR. Dalam pertemuan tersebut KY mengajukan secara resmi 5 CHA yang diharapkan bisa diterima DPR, khususnya Komisi III DPR.

Walau sudah dijelaskan secara profil dan rekam jejak kelima CHA itu, Komisi III, kata Nudirman, tetap akan mencari informasi dari masyarakat



Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir

luas menyangkut rekam jejak kelima CHA yang diusulkan tersebut. "Bila ada informasi terbaru dari masyarakat

menyangkut rekam jejak kelima CHA, maka itu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Komisi III, lepas dari hasil penilaian KY," ujar politisi Partai Golkar ini.

Usulan CHA ini berdasarkan permintaan MA yang membutuhkan 10 hakim agung yang lowong dan hingga kini belum terisi. Kesepuluh posisi hakim agung yang lowong terdiri dari 2 hakim untuk kamar agama, 3 untuk kamar perdata, 2 untuk kamar pidana, dan 3 untuk kamar tata usaha negara. Dari 22 hakim yang melamar dan dicalonkan, KY hanya meloloskan 5 CHA.

Lima CHA yang lolos seleksi adalah Amran Suadi (agama) dengan nilai akhir 73,61, Purwosusilo (agama) 71,55, Sudrajad Dimiyati (perdata) 72,54, Muslich Bambang Luqmono (pidana) 68,28, dan Is Sudaryono (TUN) 73,28. (mh) foto: andry/parle/hr.

Implementasi Kurikulum 2013 Masih Bermasalah



Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore

Implementasi Kurikulum 2013 dinilai masih diliputi permasalahan. Pasalnya, Kurikulum yang dimulai bertahap dari tahun lalu ini tidak henti-hentinya menuai banyak protes. Selain proses pendistribusian buku yang belum selesai, para guru juga mengeluhkan penerapan kurikulum baru tersebut, pasalnya pelatihan guru belum dilakukan secara menyeluruh.

Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore juga menilai hal yang sama. Ia menyanggah implementasi Kurikulum 2013 yang masih membingungkan. Pemerintah sendiri yang menentukan target, tapi realisasinya tidak tercapai. Tahun ini, pemerintah menargetkan distribusi buku dan pelatihan guru dapat diselesaikan. Namun, hingga pertengahan Agustus 2014, masih banyak sekolah yang menerima buku.

“Banyak buku yang belum diterima oleh sekolah. Mungkin karena salah cetak atau distribusinya bermasalah. Target pemerintah, tahun ini buku-buku harus diterima

oleh seluruh sekolah di Indonesia. Termasuk pelatihan guru juga belum selesai dilaksanakan,” sesal Jefirstson waktu ditemui usai rapat kerja dengan Kemendikbud, di Gedung Nusantara I, Rabu (20/08).

Politisi Demokrat ini menegaskan, hal yang harus segera dikejar adalah penyediaan buku dan pelatihan guru. Namun, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan malah kelabakan.

“Di satu sekolah, murid sudah mendapat buku, namun gurunya belum. Namun hal sebaliknya malah terjadi di sekolah lain. Itu jadi persoalan utama, ini membingungkan guru dan murid,” imbuhnya.

Hal lain yang menjadi sorotan Politisi dari Dapil Nusa Tenggara Timur ini adalah penambahan jam belajar. Ia mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan masalah ini. Kemendikbud mengaku menambah empat sampai enam jam pelajaran setiap minggunya. Mendikbud M. Nuh menyarankan tidak perlu menambah hari belajar, misal dari lima hari menjadi enam hari.

“Soal jam belajar yang bertambah akibat Kurikulum 2013, kami akan mengevaluasi hal itu. Mengingat anak juga membutuhkan waktu untuk istirahat dan berkumpul dengan keluarga. Jangan dipaksakan. Pemerintah harus mempertimbangkan hal itu,” tegas Jefirstson.

Komisi X, tambah Jefirstson, dalam waktu dekat akan segera melakukan raker dengan Mendikbud. Utamanya, akan membahas implementasi Kurikulum 2013. Apalagi, periode Mendikbud M. Nuh menjabat tidak lama lagi, sehingga jangan sampai terkesan meninggalkan masalah kepada pemerintahan yang baru.

“Secara substansi, Kurikulum 2013 sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya, itu yang menjadi persoalan dan banyak sekali masalah, dan bahkan kami sudah mendapat laporan dari masyarakat. Hal-hal ini akan kami rapatkan kepada Mendikbud, yang direncanakan minggu depan,” tutup Jefirstson. (sf) foto: odjie/parle/hr.

Postur RAPBN 2015 Belum Serious Garap Sektor Pertanian

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan postur RAPBN 2015 belum memberikan perhatian serius di sektor pertanian. “Ini terlihat belum ada keseriusan pemerintah di

dalam RAPBN 2015, karena memang masih masa transisi Presiden jadi belum terlihat detail dan fokus untuk dijadikan *guidance* bagi pemerintahan mendatang,”ujarnya saat diwawancara

rai oleh Parlemen, di Gedung DPR, Rabu, (20/8).

Menurut Firman, pemerintahan kedepan harus fokus kepada sektor

pertanian. Pasalnya pertanian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun dikarenakan beberapa hal diantaranya kualitas didaerah.

“Petani kita sudah tidak lagi tertarik untuk menjadi petani karena biaya produksi semakin mahal, Sementara hasil dari pertanian tidak ekonomis dan barang impor semakin banyak. Selain itu, efisiensi masih kalah dengan petani asing, persoalan lainnya yaitu irigasi infrastruktur rusak nyaris tidak lagi mendapat air karena tidak berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Firman menambahkan, saat ini ketahanan pangan kita bertumpu di enam propinsi diantaranya Propinsi Jateng,



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo

NTB, Jatim, Jabar, Banten, maupun Sulsel. “Posisi di enam provinsi tersebut sangat mengkhawatirkan apalagi unsur pendukungnya seperti lahan ataupun pupuk organik semakin menurun akibat banyaknya pupuk anorganik,” jelasnya.

Yang paling mendasar, lanjutnya, lahan pertanian banyak yang beralih fungsi di Pulau Jawa bahkan mencapai 100-200 ribu hektar pertahun. “Kita juga memiliki UU lahan pertanian berkelanjutan namun faktanya belum banyak dijalankan amanah UU itu. Ini juga menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah untuk mencapai swasembada pangan,” paparnya. (as/si) foto: andry/parle/hr.

Jakarta Sentris Akibat Sistem Anggaran Piramida Terbalik

Politik anggaran selama ini yang berbentuk piramida terbalik telah membuat Jakarta sentris. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi dan bedah buku kerangannya yang bertajuk “19 Kementrian Negara; Sebuah Pemikiran” di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).

“Selama ini politik anggaran kita berbentuk piramida terbalik, dimana semua uang ditaruh di Kementerian dan menggemukkan anggaran di Pusat, sementara di bawah hanya dikurcurkan sedikit demi sedikit, sehingga terjadi Jakarta sentris,” jelas Agun.

Kondisi “Jakarta sentris” yang demikian menyebabkan para pejabat daerah beramai-ramai pergi ke Jakarta untuk memperoleh kucuran dana lebih besar. Hingga kemudian terjadi praktek mafia anggaran. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga dapat memicu terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di beberapa daerah.

Oleh karenanya, ke depan Agun beranggapan untuk mewujudkan Indonesia sejahtera adalah dengan *political will* pemerintah untuk merubah struktur

anggaran dari piramida terbalik ke sistem piramida. Dimana anggaran makin ke bawah makin besar. Sehingga anggaran terbesar berada di daerah, sementara di pusat tidak terlalu banyak menampung anggaran.

structure follows function. Sementara penerapan konsep *money follow function* dapat dilakukan berdasarkan fungsi atau satuan kerja yang telah dibentuk berdasarkan UU. Oleh karena itu syarat awal dipenuhinya *money follow function* dilakukan dengan melihat



Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa dan Pengamat Politik Siti Zuhro dalam acara Bedah Buku

“Dengan sistem anggaran Piramid, Pusat hanya bertugas membuat kebijakan, melakukan supervisi atas unsur yang menjadi tanggung jawabnya,

fungsinya, sehingga penggunaannya tepat sasaran,” papar Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini. (Ayu) foto: odjie/parle/hr.

Komisi IV DPR Tunggu Surpres Bahas RUU KTA

RUU Konservasi Tanah dan Air masih belum dapat dibahas lebih lanjut, hal tersebut disebabkan karena belum adanya surat presiden (surpres) terkait penunjukan siapa yang ditugaskan untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.

“RUU ini sudah melewati tahap persetujuan di Paripurna bersama dengan RUU Perkebunan. Namun pembahasan lebih lanjut masih belum bisa dilakukan, mengingat sampai saat ini kami belum menerima Surpres (surat presiden) untuk menunjuk wakil dari pemerintah yang akan ditugaskan membahasnya bersama DPR,” jelas Ketua Komisi IV DPR RI, M Romahurmuziy kepada Parle sesaat sebelum berlangsungnya sidang paripurna DPR RI, Selasa (19/8).

Romy, begitu ia biasa disapa menambahkan bahwa saat ini ‘bola’ atas penyelesaian RUU yang merupakan



Ketua Komisi IV DPR M. Romahurmuziy

inisiatif DPR itu ada di tangan pemerintah. Artinya disinilah akan terlihat kesungguhan pemerintah untuk ikut menyelesaikan RUU ini. Karena dilanjutkannya, hanya tinggal satu bulan bagi DPR periode sekarang untuk membahas tentang hal tersebut.

“Di DPR sendiri tidak ada sistem carry over atau perpindah tangan terhadap tugas yang belum diselesaikan termasuk RUU KTA. Meski demikian hal tersebut masih bisa dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya. Oleh karenanya sangat sayang jika sebuah proses konsistional yang begitu procedural dan sudah dijalankan dalam waktu yang begitu singkat ini harus terhenti karena keterlambatan surpres,” tegas Politis Fraksi PPP ini.

Menurutnya, keterlambatan Surpres ini hanya semata proses administrasi. Ia meyakini, karena dalam RUU ini tidak ada kepentingan politik dan kewenangan terhadap RUU tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada RUU Perkebunan. Lebih lanjut Romy mengaku, jika RUU ini tidak dapat diselesaikan pada periode ini, pihaknya akan mencoba untuk terus mengusulkannya pada periode mendatang. (Ayu)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR Optimis RUU Pilkada Selesai Pada September 2014

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja optimis Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada selesai pada September 2014 dan segera disahkan pada Rapat Paripurna.

Demikian dikatakan Hakam Naja dalam diskusi yang bertemakan “Perkembangan Pembahasan RUU Pilkada” di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/6). Hadir pula dalam diskusi tersebut Dirjen OTDA Kemendagri Djohermasyah Johan.

Menurut Hakam Naja, RUU Pilkada ini telah dibahas selama dua tahun, dan ada beberapa hal, jelas Hakam Naja yang belum disepakati bersama pemerintah mengerucut pada masalah wakil kepala daerah.

“Masih ada dua opsi untuk posisi wakil kepala daerah, apakah dipilih hanya dari unsur pegawai negeri sipil (PNS) atau dari semua unsur termasuk unsur partai politik,” terangnya.

Ia menambahkan, tarik ulur lainnya dalam pembahasan RUU Pilkada dengan pemerintah adalah mengenai Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih langsung, “Karena Pilkada serentak dimulai pada 2015 dan pemilu serentak pada 2019,



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja dan Dirjen OTDA Kemendagri dalam Forum Legislasi

sedangkan Pilkada serentak nasional akan berlangsung pada 2021, itu agar ada pemilu sela, ada jeda politik, serta terkait dengan sengketa pemilu yang kemungkinan bertambah banyak,” tegasnya.

Terkait masalah sengketa Pilkada, ia melihat Mahkamah Konstitusi sudah tidak sanggup lagi mengatasinya, maka menurut politisi dari PAN ini sengketa Pilkada akan diserahkan

kan ke Mahkamah Agung (MA), namun hanya untuk Pilkada Provinsi.

“MA tidak mampu lagi dibebani dengan sengketa Pilkada untuk kab/kota, karena tugasnya sudah berat maka diusulkan ditangani oleh Pengadilan Tinggi (PT) atau semuanya terpusat di Jakarta,” ujarnya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Dirjen OTDA Kement-

dagri Djohermasyah, menurutnya RUU Pilkada mendesak untuk segera disahkan, mengingat pada 2015 sebanyak 203 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya.

“Jadi, akan ada Pilkada serentak grup I sebanyak 203 daerah. Ada bersamaan gubernur dengan bupati, semua ini akan mengurangi biaya dan konflik politik. Sedangkan Pilkada serentak grup II pada 2018 untuk 285 daerah,” ujarnya. (nt/sc)/foto:andri/parle/iw.

Data Bagi Anggota Parlemen Perlu Didukung Riset



Ketua BKSAP Surahman Hidayat saat membuka Workshop Penguatan Riset untuk Mendukung Kinerja Anggota Parlemen

Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI mengadakan Workshop Penguatan Riset untuk Mendukung Kinerja Anggota Parlemen. Kegiatan ini bekerja sama dengan sejumlah lembaga yaitu AIPA (*Asean Inter-Parliamentary Assembly*) dan Lembaga Kerja Sama Internasional dari Jerman - GIZ berlangsung selama dua hari 19-20 Agustus.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah bagaimana parlemen yang akan datang lebih handal karena didukung

data dengan hasil penelitian, research yang lebih kuat. Bagaimana penguatan *research* itulah yang kita bahas dalam *workshop* ini,” kata Ketua BKSAP Surahman Hidayat kepada wartawan usai membuka acara secara resmi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/14).

Ia menjelaskan *workshop* diikuti oleh delapan negara Asean yaitu, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Vietnam, Kamboja, Brunei dan Indonesia. Sebagian besar peserta adalah staf sekre-

tariat, tenaga ahli dan staf pendukung anggota parlemen lainnya.

Hasil temuan AIPA lanjutnya, parlemen disejumlah negara Asean dalam melaksanakan tugasnya memperkuat demokrasi belum didukung data yang berbasis hasil penelitian. Ini tentu berpengaruh pada keputusan dan produk legislasi serta *output* lain yang dihasilkan.

“*Workshop* ini yang pertama memang kita khususkan bagi staf, selanjutnya kita juga merencanakan *workshop* lanjutan untuk anggota parlemen rencananya bulan Oktober yang akan datang. Fokusnya adalah bagaimana memanfaatkan hasil *research*,” tutur politisi FPKS ini.

Sementara itu Sekretaris Jenderal AIPA Periowsamy Otharam dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BKSAP DPR yang telah bersedia menjadi tuan rumah dan menyediakan dukungan logistik bagi terselenggaranya acara ini. Ia meyakini keberhasilan pelaksanaan *workshop* akan meningkatkan kinerja anggota parlemen di kawasan Asean. (iky/silvi)/foto:rizka/parle/iw.

Presiden Baru Perlu Kebijakan Radikal Laksanakan Programnya

Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, RAPBN 2015 yang disampaikan Presiden SBY sifatnya masih *base line* tahun 2014. Karena itu kalau tidak ada kebijakan yang ra-

dikal tidak mungkin Presiden baru punya kesempatan untuk menyampaikan program-program yang diperjuangkan selama kampanye.

Hal itu dikatakan Noor Supit menjelang Sidang Paripurna DPR Selasa (19/8) menanggapi RAPBN 2015 yang disampaikan Presiden SBY tanggal 15 Agustus lalu. Dalam RAPBN 2015



Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit

tersebut antara lain disebutkan bahwa belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp 433,5 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk subsidi energy sebesar Rp 363,5 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp 70,00 triliun.

Namun kata Noor Supit, bagi Presiden baru ada *space* yang disiapkan. Subsidi energi yang berjumlah Rp 433 T memang harus dikurangi. Bahkan konsep yang diajukan Banggar DPR bagaimana subsidi tersebut harus dialihkan kepada sesuatu yang sangat produktif termasuk untuk program infrastruktur.

“Jadi *space* nya besar,” tambah dia. Karena itu pembahasan RAPBN 2015

lanjutan akan dilakukan setelah tanggal 21 Agustus dimana keputusan MK mengenai gugatan pilpres dilakukan. Dalam pembahasan nanti harus ada Tim pendampingan dari Presiden baru.

Karena itu pula dia berharap, Pemerintahan sekarang tidak mengambil kebijakan yang signifikan. Tim pendamping dari Presiden terpilih itu nanti yang dominan meski tidak formal. “Kita akan beri kesempatan sebesar-besarnya kepada Tim Ekonomi Presiden terpilih pada saat pembahasan RAPBN 2015 mulai Rabu depan sampai dengan tanggal 23 September,” ujar Noor Supit. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw

Anggota Kongres Peru Apresiasi Perkembangan Indonesia

Perkembangan Indonesia yang mengarah ke arah baik diapresiasi oleh Anggota Kongres Peru sekaligus Ketua Liga Persahabatan Parlemen Peru – Indonesia Yohny Lescano. Hal itu diungkapkan oleh Lescano saat diterima oleh Ketua Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR – Parlemen Peru Imam Suroso.

Dalam pertemuan ini, Imam didampingi oleh Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen Eddy Sadeli. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat BKSAP, Gedung Nusantara III, Lantai 4, Senin (18/08).

Imam, yang sekaligus Anggota BKSAP DPR ini menyatakan, kunjungan Lescano dalam rangka kunjungan balasan dari Peru, dimana sebelumnya BKSAP DPR sudah pernah melakukan kunjungan pada Mei 2013 lalu. Imam mengaku, kunjungan Parlemen Indonesia diterima baik oleh Parlemen Peru.

“Kunjungan balasan ini untuk lebih meningkatkan lagi hubungan bilateral kedua negara, beberapa bahasan yang diharapkan dapat menguntungkan kedua negara diantaranya ekspor import, bidang pertanian, pariwisata, perdagangan dan kebudayaan,” jelas Imam.



Ketua Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR – Parlemen Peru Imam Suroso saat menerima Anggota Kongres Peru

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, terkait dengan ekspor impor, Lescano berjanji akan memperbanyak frekuensi keluar dan masuknya komoditas di kedua negara. Selain itu, Lescano juga berjanji akan menyamakan pajak Indonesia kepada Peru akan disamakan dengan negara-negara di Asia.

Dalam kesempatan yang sama, Lescano menyatakan, untuk meningkatkan perdagangan bebas di kedua negara, Peru sudah memberlakukan

bebas visa bagi warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Peru. Sedangkan untuk pajak, sedang dalam pembahasan di Parlemen Peru.

Lescano menyatakan apresiasinya terhadap kinerja KPK sangatlah bagus, sehingga bisa meminimalisir kebobrokan dan penyalahgunaan anggaran negara. Bahkan, menurutnya, KPK tidak pandang bulu dalam memberantas koruptor.

“Dia sangat kagum dengan KPK.

Bahkan, Lescano akan mengadopsi dan menerapkan hal ini di Peru,” jelas Imam.

Hal lain yang menjadi pembahasan adalah pendidikan dan masalah gempa bumi. Lescano menilai kondisi pendidikan di Indonesia sudah cukup baik. Sedangkan, untuk bencana alam seperti gempa bumi, Peru sudah memiliki cara untuk menanggulangnya, sehingga bisa berbagi informasi kepada Indonesia.

“Untuk teknisi khusus menghadapi bencana, Peru mempunyai ahli-ahli khusus, karena Indonesia juga banyak bencana. Peru bisa menanggulangi bencana dengan maksimum. Kedua negara bisa sharing mengenai penanggulangan bencana ini,” imbuh Imam.

Di akhir pertemuan, Imam meminta bantuan Lescano untuk mendukung DPR pada pencalonan Presiden Iter Parliamentary Union (IPU) yang akan dilaksanakan pada 14 Desember 2014 yang akan datang di Lima, Peru. In-

donesia akan mencalonkan Nurhayati Ali Assegaf (F-PD) agar dapat menjadi Presiden IPU.

“Beliau langsung menyetujui, dan akan mendukung secara maksimal, pasalnya Nurhayati adalah seorang perempuan, sehingga harus didorong untuk menjadi pemimpin atau Presiden IPU. Saya yakin akan berhasil. Saya memohon kepada Lescano, dan mereka menyambut positif permintaan itu,” ujar Politisi asal Dapil Jawa Tengah III ini. (sf)/foto:andri/parle/iw.

DNPI Harus Disinergikan Dengan BMKG dan BNPB

DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim) bisa disinergikan dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) juga BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah usai sidang Paripurna, Selasa (19/8).

Ungkapan tersebut menyusul adanya pro kontra dari beberapa anggota masyarakat atas keberadaan DNPI. Tidak sedikit yang memandang keberadaan lembaga yang berperan dalam melakukan strategi pembangunan melalui koordinasi yang dimulai dari kesediaan pangan sampai pada infrastruktur itu merupakan pemborosan negara. Namun tidak sedikit yang memandang badan tersebut patut dipertahankan.

“Memang akan lebih bagus untuk disinergikan dan dijadikan satu dengan BMKG dan BNPB, karena selain akan menghemat keuangan Negara juga akan mempermudah dalam mengordinasikan dan mensinergikan satu sama lain,” jelas Ida Fauziyah.

Ditambahkannya, dengan demikian akan mempermudah respon terhadap kondisi perubahan iklim yang kemudian dapat segera dilakukan pencegahan atau antisipasi terhadap dampak perubahan iklimnya, termasuk di dalamnya penanganannya. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah

Pendidikan, Elemen Penting Pembangunan Asia

Dunia pendidikan harus mendapat porsi perhatian lebih dari masyarakat Asia untuk meningkatkan pembangunan dan daya saing di era globalisasi. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan keterampilan.

Demikian disampaikan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin saat mengikuti pertemuan *Asian Parliamentary Assembly (APA)* di Teheran, Iran, 11-12 Agustus 2014 lalu. Dodi juga Ketua Delegasi DPR pada

pertemuan APA di Teheran ini sangat kosen memberi perhatian pada dunia pendidikan.

“Bukan hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan keterampilan juga merupakan salah satu faktor utama



Anggota BKSAP DPR RI dalam pertemuan APA di Teheran, Iran

dalam upaya meningkatkan daya saing masyarakat. Pendidikan berbasis pengetahuan dan pendidikan berbasis masyarakat merupakan elemen penting bagi masa depan pembangunan di Asia,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain isu pendidikan, banyak isu lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Misalnya, soal pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang masih lemah. Dodi menyayangkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia ternyata belum mampu mendorong

pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan secara signifikan di kawasan Asia.

Kesenjangan sosial antara penduduk kaya dan miskin justru semakin lebar. Di samping itu, pembangunan manusia merupakan salah satu tantangan utama yang masih kurang disadari oleh negara-negara berkembang, sambung Dodi.

Sementara di bidang kesehatan, Anggota BKSAP lainnya, Okky Asokawati yang turut hadir dalam pertemuan APA itu, menyampaikan, akses terhadap fasilitas kesehatan di wilayah Asia, termasuk Indonesia, belum merata. Ini kenyataan yang harus diakui. Anggota Komisi IX itu, menggarisbawahi, selama ini layanan kesehatan masih sangat terfokus pada kesehatan fisik.

“Seharusnya bukan hanya kesehatan fisik yang perlu diperhatikan, tetapi juga kesehatan mental,” tandasnya. Seperti diketahui, DPR RI telah mengadopsi sekaligus mengesahkan UU Kesehatan Jiwa pada bulan Juli 2004 lalu. (mh/BKSAP)/foto:doc/parle/iw.

Titikan Airmata Presiden Bentuk Tanggung Jawab Seorang Negarawan

Anggota DPR memaknai titikan air mata Presiden SBY saat pembacaan Pidato Kenegaraan, Jumat (15/8) sebagai sebuah bentuk tanggung jawab seorang negarawan. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Soemintarsih Muntoro usai Sidang Paripurna, Jumat (15/8) lalu.

“Jadi kalau saya memaknai air mata Bapak Presiden dalam Pidato tadi sebagai sebuah bentuk sikap tanggung jawab seorang negarawan yang tidak hanya bisa diselesaikan hanya dengan satu atau dua periode saja. Dan sebagai seorang negarawan Pak SBY juga siap mendukung Presiden berikutnya untuk terus melanjutkan pembangunan ini,” ungkap politisi dari Fraksi Hanura yang akrab disapa Mien ini.

Dikatakan Mien, seyogyanya sisa-sisa tugas dan tanggung jawab Presiden



Anggota Komisi VIII DPR Soemintarsih Muntoro

SBY itulah yang harus dilakukan dan dilanjutkan oleh Presiden berikutnya.

Dengan kata lain, Presiden berikutnya itu harus juga memiliki jiwa negarawan. Artinya harus bersedia melanjutkan perjuangan atau program yang baik yang sudah dilakukan oleh pemimpinnya terdahulu. Hal tersebut semata dalam rangka menegakkan keadilan, kejujuran, demokrasi, perekonomian yang mantap, dan kesejahteraan. Itu adalah pekerjaan yang besar karena bangsa ini adalah Negara yang besar dengan jumlah penduduk dan wilayahnya yang sangat luas.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Amalia Hanifa mengatakan bahwa hal yang wajar jika Presiden SBY menitikan air mata ketika tugas dan masa jabatannya telah berakhir. Tentu banyak hal yang telah dilaluinya dalam dua periode masa bhaktinya. Tidak sedikit tugas yang telah dijalankan dengan sebaik-baiknya, hal itu akan

menjadi warisan bagi Negara.

Oleh karenanya Politisi dari Fraksi PKS ini memandang hal yang wajar jika Presiden SBY merasa terharu. Bahwa

dengan upaya maksimal yang telah dilakukannya mudah-mudahan dicatat oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah kebaikan. Hal tersebut pastinya bukan hal yang mudah, terlebih lagi di tengah

masa reformasi dan arus demokrasi yang baru saja berlangsung. (Ayu)/
foto:andri/parle/iw.

PP Reproduksi Takkan Jadi Kontroversi Jika Implementasinya Sesuai Aturan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menilai PP 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi, yang membolehkan praktik aborsi tidak akan menuai kontroversi jika implementasi di lapangan semuanya merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang telah ditentukan. Hal tersebut diungkapkannya usai Sidang Paripurna Penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPR RI, Jumat (15/8).

“Pada dasarnya Indonesia menolak aborsi kecuali konteksnya berhubungan dengan kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan ini menyangkut nyawa seseorang yang harus dibuktikan dengan *medical record* dari dokter. Selain juga karena alasan tindak perkosaan. Tindak perkosaan yang seperti apa? ya tindak perkosaan yang juga dibuktikan dengan *medical record* dari dokter serta dari pihak berwajib lainnya yang memang di atur dalam undang-undang,” jelas Ledia.

Ditambahkannya, jika korban perkosaan diharuskan untuk menanggung segala apa yang tidak diinginkannya itu artinya juga melanggar hak asasi manusia. Namun demikian semua itu tentu harus dibuktikan dengan *medical record* dari dokter, apakah hal itu murni akibat sebuah tindak perkosaan atau tidak.

Menurutnya, pada dasarnya semua peraturan perundang-undangan itu berlaku umum ada perkecualian, tapi perkecualian betul-betul dalam kondisi yang khusus, dia tidak boleh kemudian digeneralisasi juga. Oleh karenanya Ledia yakin jika pengimplementasian PP tersebut sesuai dengan undang-undang, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan pro dan kontra.

“Pengimplementasian PP 61 Tahun 2014 itu sangat tergantung kepada tenaga kesehatan dalam hal ini dokter. Pertanyaannya apakah dokter atau tenaga kesehatan tersebut akan murni menjalankan tugasnya sesuai sumpah jabatan-



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah

nya, mengingat ada beberapa kasus aborsi ilegal yang juga melibatkan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Disinilah diperlukan ketegasan dalam pelaksanaan UU Tenaga Kesehatan juga. Dengan kata lain UU Tenaga kesehatan perlu diperketat pelaksanaannya,” paparnya.

Sebagaimana diketahui munculnya PP 61 Tahun 2014 merujuk pada semangat UU Kesehatan No.36 Tahun 2014 Pasal 75 ayat 1. Belakangan muncul pro dan kontra terhadap PP tersebut, bahkan pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruquthni khawatir jika PP tersebut dapat dimanfaatkan dengan sengaja untuk menggugurkan janin dalam kandungan. Karena menurutnya dalam agama apapun membunuh anak (janin) jelas sangat dilarang. (Ayu)/
foto:rizka/parle/iw.

Anggota DPR Apresiasi Pidato Kenegaraan Presiden

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengapresiasi Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka HUT ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, selama 5 tahun ini adalah pi-

dato yang paling realistis dan memberikan semangat.

“Saya merasa senang bahwa ada hal yang ditegaskan, dan saya kira ini yang harus diwujudkan secara terus menerus,



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo

karena berkaca kepada praktek selama ini memang tidak mudah dalam mengejawantahkan dari demokrasi keadilan ke kesejahteraan,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jum’at (15/8), di Gedung DPR RI.

Yang paling penting, dikatakannya, dalam konteks demokrasi adalah Presiden menegaskan dengan semangat yang kuat dan kesungguhan bahwa demokrasi kita harus bersifat kerakyatan bukan elitis. Pembangunan demokrasi yang menguatkan pembangunan sistem itu menjadi catatan penting untuk diapresiasi oleh kita semua dan tentu saja bangsa Indonesia.

“Ke depan memang pembangunan demokrasi yang menguatkan pembangunan sistem, adalah keniscayaan. Jadi yang dibangun adalah sistem dan dibangun kekuatan kelembagaan. Tentu saja itu harus diwujudkan secara nyata, tidak boleh dalam prakteknya diingkari.

Menanggapi pernyataan Presiden SBY bahwa akan membantu Presiden berikutnya jika dikendaki, Arif mengatakan hal itu hanya sekedar pernyataan atas komitmennya setelah tidak lagi menjadi presiden. “Beliau akan menjadi rakyat biasa yang tentu saja hal itu sesuatu yang baik bahwa sebagai warga biasa meskipun mantan presiden tetap akan mendedikasikan bagi kehidupan rakyat kebanyakan serta kepentingan bangsa dan negara,” jelas Arif Wibowo. (as)/foto:odjie/parle/iw.

Pemimpin Mendatang Harus Lebih Baik Dari Sekarang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memimpin Bangsa Indonesia selama sepuluh tahun dengan cukup bagus, walaupun ada beberapa catatan dan gejolak-gejolak namun dari sisi pertumbuhan ekonomi dan menjalin hubungan baik dengan negara lain semakin ada kemajuan.

Demikian dikatakan anggota Komisi XI DPR Anwar Sanusi menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-69 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara DPR Senayan Jakarta, Jum’at (15/8) siang.

Politisi PPP ini juga mengatakan, Presiden SBY menyadari sebagai manusia selalu adanya kekurangan sehingga mendapat *applaus* dari anggota dewan. “Pernyataan SBY yang telah berbuat dengan setulus hati demi bangsa dan negara, dan bersedia membantu pemikiran-pemikirannya bagi pemimpin bangsa masa depan, ini patut diapresiasi,” tegasnya.

Selanjutnya Anwar Sanusi berharap, pemimpin masa depan pengganti SBY siapapun orangnya, harus melanjutkan perjuangannya. Presiden RI adalah presiden milik bangsa Indonesia, bukan presidennya partai. Siapapun presidennya kita mengharapkan kepemimpinan yang lebih baik.



Anggota Komisi XI DPR Anwar Sanusi

“Pemimpin kita dimasa datang harus lebih baik dari sekarang. Prestasinya sama saja dikatakan bangsa yang mundur, apalagi lebih jelek dari sekarang,” kata Anwar Sanusi. (Spy)/foto:andri/parle/iw.



Penegakan Hukum Semasa Pemerintahan SBY Hanya Dinilai 5

Meskipun Presiden SBY mengatakan masalah hukum sudah begitu bagus, tetapi bagi Komisi III DPR tidak seperti itu. “Di bidang penegakan hukum, yang saya alami tidak seperti itu. Justru anggaran penegakan hukum di negeri ini tidak jelas. Begitu pula koordinasi antar penegak hukum, tidak berjalan dengan baik,” ungkap anggota DPR Nasir Djamil mengomentari pidato Kenegaraan terakhir Presiden SBY di depan Sidang Bersama DPR dan DPD pekan lalu.

Dalam pidatonya Presiden antara lain menyebutkan bahwa pada periode 2004-2012 telah menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang dicurigai melakukan kasus korupsi. Pada periode itu pula, terdapat 277 pejabat negara baik pusat maupun daerah, baik, eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang ditangani KPK terkait kasus korupsi.

Namun yang disorot anggota DPR Nasir adalah koordinasi dalam pen-



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil

gakan hukum. “Kita harapkan Menko Polhukam bisa mengkoordinasi masalah hukum, namun ternyata tidak seperti kita harapkan. Karena itu penegakan hukum semasa Pemerin-

tahan SBY saya beri nilai lima,” tandas politisi PKS asal Aceh ini.

Anggota dewan yang duduk di Komisi III (bidang hukum dan peradilan) juga menilai, pidato Presiden itu sifatnya informatif berupa laporan kemajuan yang dicapai. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat di lapangan ingin mendapatkan kenyataan, misalnya orang miskin bisa lebih baik nasibnya, orang yang putus sekolah bisa sekolah lagi. Sementara dari laporan sejumlah media, ada jembatan ambruk, ada sawah gagal panen dan sekolah ambruk. “Hal-hal seperti ini menjadi tantangan,” ujarnya.

Di satu sisi kata Nasir, memang informasi itu perlu diketahui masyarakat, tetapi di sisi lain masyarakat juga perlu tahu dan bukti. “Sebab kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak sepenuhnya sesuai kondisi dan kenyataan di lapangan, sebagaimana dilaporkan Presiden,” kata Nasir menambahkan.

(mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR Berhasil Bila Mampu Kerja Sama dalam Perbedaan

Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman mengatakan banyak perbedaan dalam dinamika politik anggota legislatif di Senayan. Keberhasilan melaksanakan tugas kedewanan bukan karena yang satu mendominasi yang lain tetapi karena mampu membangun kerja sama di tengah perbedaan itu.

“Bisa saja partai kita berbeda pendapat, beda platform, tapi itu tidak menghentikan kita untuk berkomunikasi dalam mencari upaya membangun bangsa, di situlah keberhasilannya. Mudah-mudahan pembekalan ini memberi ruang untuk itu,” katanya saat membuka secara resmi Pembekalan Anggota DPR Periode 2014-2019, Gelombang III di Lemhannas, Jakarta, Senin (18/8/14).

Ia meyakini banyak orang mempunyai keyakinan setiap partai punya niat baik pada bangsa, tanpa itu menurutnya hidup akan penuh kecurigaan dan kondisi itu tidak baik bagi energi bangsa untuk maju kedepan. Dalam pembekalan yang berlangsung selama tiga minggu diharapkan anggota dewan terpilih dapat membangun perspektif yang sama dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan bangsa ke depan.



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman saat memberikan pembekalan Anggota DPR Periode 2014-2019

Politisi FPKS ini mengajak anggota DPR bersama masyarakat menjaga modal sosial bangsa yang sudah ada saat ini yaitu rasa memiliki Indonesia, menjaga upaya pemerataan-Indonesia bukan milik sekelompok orang atau organisasi tertentu. “Rasa kebersamaan, yang mendorong kita mam-

pu membangun kerja sama dengan seluruh potensi bangsa yang berbeda ras, suku apalagi sekedar berbeda parpol,” tandasnya.

Kartika Yudhisti, anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan Banten II menyambut baik pelaksanaan pembekalan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Iapun terlihat antusias ketika diminta menjadi perwakilan yang menerima secara simbolis tanda peserta. Politisi PPP ini melangkah

tegap melintasi ruang upacara. Ia tergelak ketika dimintai komentar tentang langkah tegap wakil rakyat itu.

“Langkah tegap itu biasa dari dulu juga bisa. Mungkin pembekalan ini sekaligus pelatihan kedisiplinan lagi ya. Bagi saya pembekalan ini bagus sekali, kita mendapat penyegaran tentang wawasan kebangsaan yang pasti diperlukan dalam tugas nanti,” pungkask dia. (iky)/foto:odjie/parle/iw.

Pembahasan RAPBN 2015 Tidak Akan Terlalu Berat

Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman mengatakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara - RAPBN 2015 diperkirakan tidak akan terlalu berat dan bisa selesai tepat waktu. Dalam proses transisi pemerintahan pasca pemilu, kesepakatan akan fokus pada hal mendasar agar pemerintah dan pelayanan publik tetap berjalan.

“RAPBN 2015 tidak akan terlalu berat karena pembahasan bersifat *baseline* atau hal-hal mendasar saja supaya pemerintahan dan pelayanan publik tetap jalan. Dengan itu kita memberikan kebebasan kepada presiden terpilih untuk memasukkan visi misinya kedalam APBN,” katanya saat menjadi pembicara dalam Pembekalan Anggota DPR Periode 2014-2019 di Lemhannas, Jakarta, Senin (19/8/14).

Ia meminta anggota DPR yang baru terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014 ini, segera belajar cepat tentang mekanisme pembahasan anggaran. Politisi FPKS ini memperkirakan presiden yang baru sudah akan mengusulkan APBN Perubahan pada bulan Februari 2015 untuk menyesuaikan anggaran dengan visi misi yang diusungnya dalam kampanye.

“Besarnya kemungkinan awal 2015 sekitar bulan Februari anggota DPR yang baru bekerja ini sudah masuk membahas APBN Perubahan, normalnya dilakukan sekitar bulan Mei. Dalam pemerintahan transisi ini besar kemungkinan akan mengajukan perubahan di awal karena ingin visi misinya masuk di APBN,” ungkap Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman saat memberikan materi RAPBN 2015

dan Keuangan yang khusus diundang bicara dalam acara ini.

Sementara itu Wakil Ketua Badan Anggaran, Djoko Udjiyanto yang juga hadir sebagai pembicara menyebut anggaran negara pada tahun depan sudah menembus angka Rp 2018 triliun. Salah satu PR yang harus jadi perhatian anggota DPR Periode 2014-2019 adalah anggaran subsidi yang sudah mencapai 20 persen sedangkan anggaran pembangunan infrastruktur hanya Rp300 triliun.

Ia meminta anggota dewan yang baru terpilih tidak perlu takut untuk berkecimpung di Badan Anggaran.

“Banyak yang menggambarkan Banggar itu seperti neraka. Sebenarnya tidak perlu takut masuk Badan Anggaran kalau kita punya niat yang baik,” tandasnya.

M. Nasyid Umar politisi Partai Demokrat menyampaikan tekadnya untuk bekerja sebaik mungkin melaksanakan amanat rakyat di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2 pada pemilu lalu. “Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan karena Banggar tidak bekerja sembunyi-sembunyi. Rapat Banggar terbuka untuk umum, jadi semua bisa mengawasi,” tegas dia. (iky)/foto:odjie/parle/iw



Hubungan Dengan Meksiko Sangat Prospektif



Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman saat menerima Senat Meksiko Teofilo Torres Corzo

Meksiko merupakan negara di kawasan Amerika Latin yang paling prospektif bagi Indonesia. Kerja sama hubungan Indonesia-Meksiko sudah berjalan 60 tahun. Perjalanan panjang hubungan kedua negara.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman saat menerima kunjungan kehormatan Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri, Asia Pasifik, Senat Meksiko Teofilo Torres Corzo, di DPR, Senin (18/8). “Kami sangat menjaga hubungan baik ini, karena

hubungan dengan Meksiko sangat prospektif bagi Indonesia,” ungkap Sohibul dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan Sohibul Iman dengan delegasi Senat Meksiko merupakan yang kedua kali, setelah kunjungannya ke Meksiko beberapa waktu lalu. Sohibul sangat mengapresiasi pemerintah dan parlemen Meksiko yang telah menerbitkan perangko khusus untuk mengenang 60 tahun hubungan Indonesia-Meksiko.

Banyak kesamaan antara Indonesia dan Meksiko. Semangat untuk menjaga lingkungan juga sudah sering diutarakan kedua negara. Meksiko bahkan telah mengirim 3 mahasiswanya ke Indonesia untuk belajar pertanian di IPB.

Sementara itu, Teofilo Torres Corzo, mengakui, Indonesia sangat penting bagi Meksiko. Untuk itu, pihaknya akan mengundang DPR kembali berkunjung ke Meksiko. Akan ada banyak kerja sama strategis dan besar di antara kedua negara. Indonesia adalah negara di Asia Pasifik yang sangat berpengaruh.

“Kami ingin bangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, terutama Indonesia. Di Indonesia ada banyak peluang kerja sama yang bisa dijalin, agar rakyat di Meksiko juga bisa sejahtera,” tutur Teofilo.

Di bidang lingkungan, kedua negara menghadapi isu yang sama. Keduanya punya hutan tropis yang luas dan punya kewajiban untuk menjaga perubahan iklim. “Kita sama-sama negara yang menghadapi isu lingkungan dan iklim yang serupa,” kata Teofilo. Pihaknya juga berharap, agar Senat Meksiko dan DPR sama-sama menjaga dunia ini tetap hijau. (mh/sw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Setjen DPR Lakukan Mutasi Pejabat

Sekretariat Jenderal DPR melakukan pengangkatan dan pemindahan pejabat administrator. Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyatakan, hal ini sebagai upaya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR.

“Rolling pejabat ini untuk penyegaran dan pengalaman baru. Selain itu, sebentar lagi Anggota Dewan yang baru akan dilantik, sehingga pejabat yang di rolling tersebut bisa menyesuaikan di unit kerja yang baru. Sebelum masa jabatan Anggota Dewan periode 2009-2014 berakhir, ini coba kami tata,” jelas Win, sapaan Winantuningtyastiti, usai pelantikan di Ruang Rapat Sekjen, Jumat (15/08) sore.

Win mengakui, proses rolling ini tidaklah mudah. Pa-



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti



salnya, untuk mendapatkan *the right man, in the right place*, dimana kualifikasi pejabat yang sudah menjabat dari dulu dengan pejabat baru sekarang cukup berbeda. Pengangkatan pejabat sekarang sudah memiliki standar yang berbeda dengan dulu.

“Dulu, kalau ada formasi, bisa langsung diisi. Beda dengan sekarang yang standarnya berbeda. Ini masih proses penataan SDM, jadi setiap periode tertentu, secara reguler kita *rolling* pejabat. Mengacu pada aturan, biasanya *rolling* pejabat itu dilakukan setiap 4 tahun sekali, namun juga melihat kondisi di kantor. Kan bisa ada yang pensiun,” imbuh Win.

Pejabat yang dilantik yaitu Kepala Bagian Persuratan Saiful dimutasi menjadi Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Achmad Prasetyo yang semula menjabat Kepala Bagian Administrasi Keuangan, dilantik menjadi Kepala Bagian Kendaraan.

Kemudian, Kepala Bagian Sekretariat BAKN Sri Lestari dipercaya untuk menjabat jabatan barunya menjadi Kepala Bagian Administrasi Keuangan. Furcony Putri Syakura yang semula menjabat Kepala Bagian Tata Usaha Ketua, kini menjabat Kepala Bagian Persidangan Paripurna.

Pejabat lainnya yang dilantik adalah Kepala Bagian Pengamanan Dalam Dwi Marijanto dilantik untuk menjabat Kepala Bagian Persuratan. Sementara itu, Restu Pramono Pangarso yang semula menjabat Kepala Bagian Perencanaan, kini menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Ketua.

Kepala Bagian Kendaraan Tamamudin, dilantik untuk menjabat Kepala Bagian Pengamanan Dalam. Dan pejabat terakhir yang dilantik adalah Kepala Bagian Persidangan Paripurna Djoko Prihandono untuk menjabat Kepala Bagian Perencanaan. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Dewan Nilai RAPBN 2015 Menarik

Dewan menilai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2015 beserta nota keuangannya yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8) di Gedung DPR RI, Jakarta sebagai sesuatu hal yang menarik.

Pasalnya RAPBN kali ini diusulkan oleh presiden lama dan akan dijalankan oleh presiden baru, serta disetujui oleh anggota DPR lama dan nanti akan diawasi oleh anggota DPR yang baru.

Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi usai menghadiri rapat Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR, Pramono Anung.

“RAPBN 2015 ini lebih banyak melanjutkan sejumlah agenda-agenda yang memang menjadi bagus bagi pemerintahan kedepan,” terang Achsanul Qosasi.



Anggota Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi

Ia menyatakan, RAPBN kali ini memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan siapapun presidennya pada tahun 2015-2019 nanti. Dan yang penting, koridornya adalah presiden nanti tidak menyimpang dari RPJPN 2005-2025 dan RPJMN dari 2015-2019.

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, bahwa defisit yang diakibatkan dari adanya suatu peneri-

maan sebesar Rp 1.700 Triliun itu tidak optimal. Banyak dari penerimaan target pajak yang diperkirakan tidak sesuai dengan harapan, karena ada sejumlah hal permasalahan ekonomi dunia yang tidak mendukung, termasuk juga harga sumber daya alam kita yang tergantung pada minyak dan batubara.

“Oleh karena itu defisit kita menjadi 2,5%, lebih tinggi dari 2,3% defisit tahun lalu. Tapi itu tidak perlu dikhawatirkan, karena yang naik itu ada tiga hal yaitu belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya.

Dirinya mengaku tidak khawatir dengan adanya defisit sampai 2,5%. Karena dengan naiknya infrastruktur, otomatis akan menjadi stimulan bagi ekonomi.

“Insya Allah dalam pemerintahan yang baru ini akan menjadi bagus karena infrastruktur sudah disiapkan sesuai dengan janji kampanye semua presiden saat itu,” tukasnya. (sc) foto: naefuroji/parle/iw.

RUU Jaminan Produk Halal Diharapkan Selesai Masa Sidang Ini

DPR RI bersama Pemerintah masih membahas Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) untuk memberikan payung hukum dan jaminan ketenangan pada

warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam. Termasuk mendapatkan jaminan keamanan soal makanan dan minuman terkait kehalalan dan keharamannya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Rubaei menginginkan RUU tentang JPH dapat segera selesai pada akhir masa persidangan DPR periode 2009-2014 tanggal 30 September. “Itu

memang tugas negara dan belum terwujud. Saya berharap dalam waktu yang pendek ini bisa diselesaikan,” kata politisi Fraksi Partai Amanat Nasional di Jakarta. Kamis (15/8) lalu.

Komisi VIII selama sebulan ini, kata dia, bisa memforsir pembahasan RUU JPH yang masih ada tarik menarik yang sesungguhnya tidak terlalu prinsip terkait instansi yang memiliki otoritas dalam menentukan serba halal. “ Menurut pandangan saya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki otoritas dalam menentukan serba halal, mulai dari proses sampai mengeluarkan sertifikat halal untuk makanan dan minuman,” katanya.

Dia mengungkapkan ada pandangan lain, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sebuah badan di mana keterlibatan MUI



Anggota Komisi VIII DPR Achmad Rubaie

menjadi subordinat di bawah lembaga itu. “Itu yang kemudian menyebabkan

MUI tidak terlalu *happy* karena otorisasinya tidak penuh. Itulah yang menjadikan pembahasan menjadi lama,” katanya.

Politisi PAN ini menjelaskan bahwa persoalan sertifikasi halal ini sudah di MUI, namun yang kurang adalah soal pengawasan, intinya dalam RUU ini tidak punya perangkat pengawasan. Begitu sebuah makanan disertifikat halal, maka pengawasannya harus dibawah pemerintah.

“Kita ingin MUI sebagai pemberi sertifikat dan pengawasannya dari pemerintah, karena pemerintah punya perangkat. Pemerintah punya aparat seperti Satpol PP. itulah yang sesungguhnya diharapkan dan kalau bisa sinkron itu sangat bagus,”

paparnya. (as) foto: andry/parle/iw.

Putusan MK Suka Tidak Suka Harus Diterima

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin meminta segenap pihak menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu presiden yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Ia mengingatkan aturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama, keputusan Majelis Hakim Konstitusi sifatnya final dan mengikat.

“Kalau secara aturan dan undang-undang yang ada putusan Mahkamah Konstitusi itu *final and binding*. Jadi sebagai putusan yang dibacakan oleh Hakim MK itu, suka atau tidak suka harus diterima,” katanya usai menjadi pembicara dalam Pembekalan anggota DPR Periode 2014-2019 di Lemhanas, Jakarta, Jumat (22/8/14).

Terkait upaya hukum lain yang ingin diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta menurut politisi FPG ini bisa saja dilakukan. Sebagai contoh lanjut Aziz ada keputusan majelis hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi sanksi kepada penyelenggara pemilu.

“Ada putusan DKPP yang menyatakan anggota KPU bersalah, ini bisa ditindaklanjuti ke pengadilan, PTUN misalnya. Putusan DKPP dijadikan dasar tuntutan bahwa penyelenggara pemilu memang secara sengaja melakukan pelanggaran,” tandasnya.

Pada bagian lain ia juga menyatakan penghormatan apabila ada anggota DPR yang mengambil langkah mengusulkan pembentukan Pansus Pemilu. Baginya apabila sesuai mekanisme bisa saja dilakukan, sejumlah pihak terkait akan dipanggil dan hasilnya berupa rekomendasi-rekomendasi yang harus dilaksanakan para pihak.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyatakan majelis hakim yang dipimpinnya mengabulkan 14 gugatan pelanggaran kode etik, yaitu 13 gugatan terkait dengan pemilihan presiden dan satu gugatan mengenai proses pemilu legislatif. Tujuh anggota KPU dan dua anggota Panwaslu diberhentikan. 30 penyelenggara pemilu lainnya mendapat peringatan diantaranya karena terbukti bersalah membuka kotak suara tanpa perintah pengadilan. (iky) foto: andry/parle/hr.

Komisi II Apresiasi Laporan Mitra Kerja

Komisi II DPR RI mengapresiasi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 ke empat mitra kerjanya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga negara tersebut di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8) malam.

“Kami mengapresiasi laporan ke empat mitra kerja tersebut, mesti hingga Agustus 2014 saat ini penyerapannya baru mencapai 70 persen itu pun digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Masih ada waktu bagi keempat mitra kerja kami tersebut untuk menyerap anggaran hingga seratus persen. Hal tersebut semata agar program-program yang telah disusun dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai harapan,” papar anggota Komisi II, Achmad Muqowam.



Anggota Komisi II DPR Achmad Muqowam

Sementara itu untuk R-APBN 2015 sesuai dengan nota keuangan yang dianggarkan oleh mitra kerjanya, dimana hampir semua melakukan peningkatan anggaran yang cukup signifikan. Sebut saja KemenPAN-RB yang mengalami kenaikan sebesar 48,6 Miliar atau sekitar 25 persen dari Pagu kementerian tahun 2014 yang telah direvisi. Untuk

hal tersebut politisi dari Fraksi PPP ini menilai hal tersebut sangatlah wajar. Mengingat mitra kerja Komisi II tersebut dapat dikatakan ruh atau jiwa dari pemerintah secara keseluruhan.

“Saya kira apa yang diminta (disusun-red) oleh mitra kerja Komisi II itu merupakan sebuah modernitas pengelolaan negara yang baik. Dan untuk sebuah ide besar, kenaikan atau peningkatan anggaran yang diminta itu tidak seberapa atau masih tergolong hal yang wajar,” ungkapnya.

Walau demikian Muqowam juga mengkritisi indikator kinerja yang dilakukan oleh Kemen PAN-RB, terutama yang berkaitan dengan Indeks Persepsi Korupsi, Skor Integritas Pelayanan Publik Nasional, dan Peringkat Kemudahan Berusaha. Karena menurutnya hal tersebut di luar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari kementerian yang bersangkutan. (Ayu)/foto:odjie/parle/iv.

DPR Kritisi RAPBN 2015



Jubir Fraksi Demokrat Heriyanto menyampaikan Pandangan Fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sohibul Iman

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna 15 Agustus 2014 lalu. Untuk itu, DPR RI memberikan pandangan umum terkait anggaran yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru itu. Mengingat, anggaran

ini disusun dalam masa transisi pemerintahan. Sembilan fraksi DPR menyampaikan pandangan umum pada Rapat Paripurna (19/08) lalu. Dibacakan oleh masing-masing juru bicaranya, seluruh fraksi menyampaikan pandangan kritisnya terhadap asumsi makro, kebijakan fiskal, dan penganggaran di RAPBN 2015. Beberapa hal yang mendapat perhatian terkait subsidi, *lifiting* minyak, sampai ke target pendapatan negara.

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi tahun 2015 sebesar Rp 433,5 triliun, dimana sebesar Rp 363,5 triliun dialokasikan untuk subsidi en-

ergi dan subsidi non energi sebesar Rp 70 triliun. DPR menilai, sistem subsidi perlu diubah. Selama ini diterapkan subsidi harga, maka diubah menjadi sistem subsidi tepat sasaran.

Demikian harapan Fraksi Demokrat yang disampaikan jubirnya Heriyanto. Dalam pandangan umum fraksinya, FPD menyebutkan, dengan perubahan subsidi tersebut maka alokasi anggaran subsidi hanya untuk meringankan beban masyarakat dalam rangka memperoleh kebutuhan bahan dasar. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Hal yang sama diharapkan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Roem Kono, subsidi perlu dialokasikan secara tepat sasaran agar betul-betul dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, tidak membebani keuangan



negara dan menciderai rasa keadilan masyarakat.

“Karena itu FPG berpendapat, perlu evaluasi komprehensif menyangkut subsidi, mekanisme, pola dan kelompok sasarannya agar lebih tepat sasaran sesuai amanah konstitusi,” tandas Roem Kono.

Fraksi PDI Perjuangan melalui jubirnya Sayed Muhammad Muliady juga mengingatkan, alokasi anggaran subsidi hendaknya melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada APBN 2013 dimana Pemerintah harus memiliki kriteria yang jelas untuk memakstikan subsidi tepat sasaran. Selain itu pengeluaran pemerintah untuk membiayai SKK Migas dilakukan melalui mekanisme APBN dan kepatuhan terhadap ketentuan *cost recovery* dan perpajakan dari sektor migas.



Sayed Muhammad Muliady F-PDI Perjuangan

Sedangkan Fraksi PKS melalui jubirnya Yudi Widiana Adia memandang bahwa RAPBN 2015 masih membutuhkan peningkatan terobosan kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Penekanan ini sesuai amanat UUD 45 pasal 23 ayat (1). “Meski demikian FPKS juga memahami bahwa RAPBN 2015 disusun hanya dalam kerangka *base line*,” tandas Yudi Widiana menambahkan.

Terkait dengan pendapatan negara 2015 yang direncanakan mengalami peningkatan sebesar 7,76 persen atau senilai Rp 1.762,3 triliun dibanding APBN-P 2013 yang sebesar Rp 1.635,4 triliun. Fraksi Partai Hanura melalui jubirnya Nurdin Tampubolon meni-



Nurdin Tampubolon menyerahkan Pandangan Fraksi kepada Menkeu Chatib Basri

lai, pendapatan negara masih dapat dioptimalkan lebih tinggi dari target dalam RAPBN 2015, jika fungsi kontrol dan pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik.

“Terkait dengan defisit anggaran 2015 sebesar 257,6 triliun, fraksi Hanura tidak menyetujui terhadap penetapan defisit pada setiap penyusunan postur APBN, termasuk RAPBN 2015. Kami berpendapat, Pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi di dalam pengeluaran belanja negara terutama yang berasal dari belanja rutin pegawai yang setiap tahun mengalami kenaikan, serta menghilangkan program-program yang tidak mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Nurdin.

Kebijakan fiskal lain yang menjadi sorotan adalah *lifting* minyak dan gas bumi. RAPBN 2015 menargetkan, *lifting* minyak bumi ditetapkan sebesar 845 ribu barel per hari. Sedangkan *lifting* gas bumi dipatok sebesar 1248 ribu barel setara minyak per hari. Namun, di APBN 2014, pemerintah hanya merealisasikan *lifting* minyak bumi sebesar 790 ribu barel per hari dari target sebesar 870 ribu barel per hari. Menganggapi hal ini, DPR berharap pemerintah dapat merealisasikan target tersebut. Mengingat, sudah beberapa tahun belakangan, realisasi selalu meleset dari target yang ditetapkan.

“Untuk menghindari melesetnya realisasi *lifting* minyak dan gas bumi, maka pemerintah harus mendapat dukungan oleh kesanggupan para kontrak kerja sama (KKKS) dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya terkait dengan perizinan dan tumpang tindih peraturan pembebasan lahan,” jelas juru bicara F-PKB Chusnunia Chalim.

Harapan yang sama juga disampaikan oleh juru bicara F-Gerindra Sadar Subagyo. Sadar

menyatakan, pihaknya menyambut penetapan *lifting* dalam RAPBN 2015. Namun, perlu dicatat, target ini harus tercapai 100 persen, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Fraksi PAN meminta pemerintah melakukan audit kinerja terhadap SKK Migas dan kontraktor migas serta melakukan *real time monitoring* terhadap *lifting* minyak nasional, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sumber daya alam.



Sadar Subagyo F-Gerindra

Dan yang terakhir, Fraksi PPP meminta agar pemerintah mampu mempertahankan kondisi makro pada RAPBN 2015, menjadi lebih baik dan stabil serta berkelanjutan sehingga bisa menjadi stimulus bagi pergerakan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan rakyat. (mp,sf,as) foto: iwan armanias, odjie/parle/iw.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima Paskibraka Nasional, Kamis (21/8). Foto: Andry/Parle/Hr.



Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menag membahas Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Kamis (21/8). Foto: Andry/Parle/Hr.



Penandatanganan naskah RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) oleh Pimpinan Pansus RUU SPK bersama Menristek, Kamis (21/8). Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.